



Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur

Bintis Ti'anatud Diniati¹, Uswatun Khasanah²

^{1,2} Ekonomi Sariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

* Corresponding Author: E-mail: ^{*1} bintis.t.diniati@gmail.com

A B S T R A C T

Upah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja. Penetapan upah minimum penting diperhatikan oleh pemerintah karena digunakan untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap upah minimum provinsi di Jawa Timur tahun 2019-2023 baik pengaruh secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan uji pemilihan model terbaik. Model terbaik yang terpilih dalam penelitian ini adalah model Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan pengeluaran perkapita secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (d) Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan (e) pengeluaran perkapita tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Keywords:

*Indeks Harga Konsumen,
Indeks Pembangunan Manusia,
Pengeluaran Perkapita,
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja,
UMP*

1. PENDAHULUAN

Upah adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pemberian upah yang adil, sesuai dengan hasil kerja dan kebutuhan, menjadi perhatian utama bagi pengusaha (Charisa, 2013). Besaran upah diberikan berdasarkan waktu kerja yang dihabiskan atau jumlah produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Kehidupan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besar upah yang diterima, karena upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Oleh karena itu, upah perlu ditingkatkan agar kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya juga dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Teori ekonomi klasik memberikan penjelasan terkait upah, dengan keyakinan bahwa terdapat cadangan upah yang cenderung menyesuaikan dengan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum tenaga kerja (Jhingan, 2016). David Ricardo juga berpendapat bahwa upah memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan antara modal dan tenaga kerja. Ketika harga barang yang dibutuhkan tenaga kerja meningkat, tingkat upah pun akan ikut naik (Jhingan, 2016). Secara umum, tingkat upah diatur oleh pemerintah, yang bertujuan memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Kebijakan pengupahan pemerintah bertujuan untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas, dan daya beli mereka (Kertiasih, 2017). Kebijakan ini dikenal dengan upah minimum, yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari rendahnya nilai upah dan mencegah eksplorasi.

Setiap daerah memiliki kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang layak di daerah tersebut. Upah minimum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Indonesia, penentuan UMP harus lebih tinggi dari rata-rata UMP nasional, dan menjadi acuan bagi daerah yang menggunakan UMK dalam sistem pengupahan. Besaran UMP tidak boleh lebih tinggi daripada UMK, sehingga setiap daerah memiliki perbedaan dalam besaran UMP dan UMK yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Sejak tahun 2019 hingga 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif pada tingkat upah setiap tahunnya. Peningkatan upah minimum tersebut disebabkan oleh penyesuaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian daerah. Selain itu, penetapan kenaikan upah minimum ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan jaminan agar tenaga kerja mendapatkan upah yang pantas.

Tenaga kerja menginginkan upah yang diterima tidak hanya layak, tetapi juga cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, stabilitas dan peningkatan upah setiap tahunnya diharapkan dapat terjaga. Perkembangan UMP Jawa Timur yang terus meningkat kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Per Kapita.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upah minimum provinsi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat memberikan gambaran mengenai penawaran tenaga kerja di pasar. Dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja, pemerintah dapat

menentukan besaran upah yang wajar. Ketika jumlah lapangan pekerjaan terbatas, TPAK akan menurun, yang akan menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja yang ditawarkan biasanya akan diserap oleh sektor informal yang tidak terikat regulasi upah, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat upah (Astika,dkk., 2019).

Menurut teori pandangan klasik, TPAK mencerminkan hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap upah. Teori ini menjelaskan bahwa upah akan menyesuaikan diri untuk mengatasi kelebihan penawaran tenaga kerja di pasar. Ketika permintaan tenaga kerja menurun, akan tercipta kelebihan tenaga kerja, yang menyebabkan penurunan upah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan di pasar (Mankiw, 2008).

Selain TPAK, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur juga diperkirakan dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan serta kesejahteraan suatu negara, dan dapat menggambarkan tingkat kualitas tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kemampuan bekerja. IPM berhubungan langsung dengan upah, karena upah yang layak dapat mendorong peningkatan produktivitas dan jumlah produksi tenaga kerja (Aprilia dan Aida, 2024). Pengaruh IPM terhadap UMP sesuai dengan teori upah efisiensi, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara upah dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah akan memicu peningkatan produktivitas kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik akan menghasilkan produktivitas tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong tingkat upah yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kontribusi produktif tersebut (Mankiw, 2006).

IPM yang tinggi akan mendorong kenaikan upah, termasuk UMP. Semakin baik kualitas tenaga kerja di suatu daerah, semakin menarik bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja dengan upah tinggi meningkat, sehingga tenaga kerja akan menerima upah lebih tinggi seiring dengan peningkatan hasil (output) yang dihasilkan (Subri, 2008). Selain TPAK dan IPM, Indeks Harga Konsumen (IHK) juga diduga mempengaruhi besaran UMP yang ditetapkan pemerintah. IHK mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Ketika harga barang dan jasa meningkat, tenaga kerja cenderung menuntut kenaikan upah untuk mencocokkan peningkatan biaya hidup yang timbul akibat kenaikan harga tersebut. Dari perspektif tenaga kerja, upah ditentukan oleh perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang mereka konsumsi (Sukirno, 2007).

Teori yang diajukan oleh David Ricardo menjelaskan hubungan antara IHK dan upah. Menurut teori ini, upah sangat dipengaruhi oleh biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja. Ketika harga barang yang diperlukan tenaga kerja naik, tingkat upah pun akan meningkat. Dalam jangka panjang, kenaikan harga barang dan jasa akan menurunkan daya beli tenaga kerja. Oleh karena itu, tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli tenaga kerja tetap terjaga. IHK dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah (Jhingan, 2016).

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur kemungkinan dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita merujuk pada pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga dalam periode tertentu (Halim, 2012). Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator penting

untuk menggambarkan kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya upah yang diterima; semakin tinggi upah yang diperoleh, semakin besar kemungkinan kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat.

Pengeluaran perkapita memberikan gambaran mengenai daya beli tenaga kerja melalui konsep Purchasing Power Parity (PPP) dan berfungsi sebagai salah satu indikator dalam menilai status pembangunan manusia di suatu wilayah (Mahrany, 2012). Pengeluaran perkapita merupakan pencapaian dalam mewujudkan kehidupan yang layak, terkait dengan konsumsi riil per kapita. Kemampuan daya beli tenaga kerja terhadap kebutuhan pokok, yang terlihat dari rata-rata konsumsi per kapita, menjadi pendekatan pendapatan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang bertujuan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dianggap meningkat jika konsumsi riil per kapita mengalami peningkatan (Mahrany, 2012).

Menurut teori ekonomi klasik, upah akan cenderung menyesuaikan dengan jumlah uang yang dibutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya (Jhingan, 2016). Agar daya beli tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, mereka membutuhkan pendapatan atau upah yang setara atau lebih tinggi dari tingkat daya beli tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja akan dapat mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengeluaran perkapita bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi yang layak bagi tenaga kerja di setiap daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan pengeluaran perkapita terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi di Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Upah

David Ricardo berpendapat bahwa upah memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan antara modal perusahaan dan tenaga kerja. Upah akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang yang diperlukan oleh tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja (Jhingan, 2016). Teori Undang-Undang Upah Besi (Ferdinand Lassalle). Lassalle berpendapat bahwa teori yang diajukan oleh David Ricardo hanya menguntungkan pihak majikan. Oleh karena itu, menurut teori ini, buruh harus berjuang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi agar dapat mencapai kesejahteraan hidup yang layak (Khairi, dkk., 2021). Teori Upah Sosial. Teori ini diterapkan di negara-negara sosialis, di mana upah tidak lagi didasarkan pada produktivitas pekerjaan, melainkan semata-mata pada kebutuhan buruh. Setiap buruh diharapkan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan akan menerima upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka (Khairi, dkk., 2021).

Pembangunan Manusia

Teori modal manusia (human capital), yang memandang manusia sebagai bentuk kapital atau sumber daya. Konsep modal manusia ini terlihat ketika seseorang melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Investasi dalam modal manusia mencakup pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin banyak pelatihan yang diikuti, maka kemampuan dan keterampilan seseorang akan semakin

berkembang. Kesehatan juga berperan penting karena erat kaitannya dengan pendidikan; pendidikan yang tinggi tidak akan meningkatkan produktivitas tanpa didukung tubuh yang sehat (Todaro, 2015).

Teori investasi sumber daya manusia beranggapan bahwa setiap penambahan investasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, gizi, dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan produksi seorang pekerja (Wajdi, dkk., 2022). Upah diberikan sebagai imbalan atas nilai produk yang dihasilkan oleh pekerja. Sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja, akan meningkatkan produktivitas di masa depan (Mankiw, 2008). Selain itu, teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty menjelaskan adanya hubungan antara upah dan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas akan mendorong pemberian upah yang tinggi sebagai penghargaan atas pekerjaan yang produktif (Mankiw, 2008).

Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan ukuran untuk menggambarkan harga yang dibayar oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa. IHK ini terdiri dari tujuh kelompok komoditi, yaitu (1) bahan makanan, (2) makanan siap saji, minuman, rokok, dan tembakau, (3) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, (4) sandang, (5) kesehatan, (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta (7) transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (Hartono, 2006). Kelompok-kelompok komoditi ini digunakan sebagai indikator untuk menghitung Indeks Harga Konsumen, yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa di pasar dalam suatu periode tertentu.

4. Pengeluaran Perkapita

Teori konsumsi menurut Keynes berpendapat bahwa terdapat hubungan antara konsumsi dengan pendapatan, khususnya upah. Ketika upah meningkat, konsumsi juga akan bertambah, meskipun kenaikan konsumsi tidak sebesar kenaikan upah tersebut. Ekonomi Keynes menunjukkan bahwa dengan tingginya kecenderungan konsumsi, permintaan akan barang, output, dan lapangan pekerjaan akan meningkat lebih cepat daripada kenaikan upah (Jhingan, 2016).

Menurut pandangan ekonomi klasik, upah cenderung disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum para pekerja. Ketika cadangan upah lebih tinggi dari kebutuhan hidup minimum, jumlah tenaga kerja akan meningkat, dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih ketat. Hal ini menyebabkan upah kembali turun hingga mencapai tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam keadaan stasioner, tingkat upah akan jatuh hingga cukup untuk kebutuhan hidup minimum, sedangkan dalam periode pemupukan modal yang cepat, tingkat upah akan naik melebihi tingkat kebutuhan hidup tersebut (Jhingan, 2016).

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2007). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan

kesempatan yang sama bagi setiap elemen dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2007). Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari enam Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep, dengan periode waktu 2019 hingga 2023. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Estimasi Model Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih di antara Fixed Effect Model (FEM) atau Common Effect Model (CEM) yang sebaiknya dipakai dalam proses interpretasi hasil dalam suatu penelitian. Berikut hasil dari uji chow dalam penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	246.550983	(5,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.121042	5	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang terpilih. Selanjutnya karena yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) maka dilanjutkan pada Uji Hausmen untuk melihat model yang sebaiknya digunakan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan untuk memilih model regresi data panel yang sebaiknya digunakan di antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Berikut hasil dari uji hausman dalam penelitian ini:

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.16768 1	4	0.006 8

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 2 hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section random sebesar 0,0008, sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0068 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya karena Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih maka tahap pemilihan model selesai dan tidak perlu melanjutkan ke uji Lagrange Multiplier. Artinya, model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

a. Pengujian Statistik Fixed Effect Model

Tabel 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.572202	4.026244	0.887229	0.3834
X1_TPAK	0.020539	0.010447	1.966087	0.0605
X2_IPM	0.007862	0.002193	3.584884	0.0014
X3_IHK	-0.002901	0.000412	-7.036330	0.0000
LOG(X4_PKAP)	0.576213	0.291637	1.975786	0.5593
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-squared	0.875809	Mean dependent var		14.75691
Adjusted R-squared	0.855938	S.D. dependent var		0.269108
S.E. of regression	0.023317	Akaike info criterion		-4.579008
Sum squared resid	0.013592	Schwarz criterion		-4.273342
Log likelihood	81.38692	Hannan-Quinn criter.		-4.609890
F-statistic	44.07567	Durbin-Watson stat		2.221093
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 3 hasil estimasi Fixed Effect Model dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3,572202 - 0,020539X1 + 0,007862X2 - 0,002901X3 + 0,576213X4 + \mu_{it}$$

Hasil estimasi Fixed Effect Model dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 3,572202 dapat diartikan jika variabel independen naik satu satuan secara rerata, maka variabel dependen akan naik sebesar 3,572202. Nilai koefisien regresi variabel X1 (TPAK) bernilai negatif sebesar -0,020539. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel TPAK meningkat satu satuan, maka variabel Y (UMP) akan menurun sebesar 0,020539, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 (IPM) bernilai positif sebesar 0,007862. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel IPM meningkat satu satuan, maka variabel Y (UMP) akan meningkat sebesar 0,007862, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi Variabel X3 (IHK) bernilai negatif sebesar -0,002901. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel IHK meningkat satu satuan, maka variabel Y (UMP) akan menurun sebesar 0,002901, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi Variabel X4 (Pengeluaran Perkapita) bernilai positif (+) sebesar 0,576213. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel pengeluaran perkapita meningkat satu satuan, maka variabel Y (UMP) akan meningkat sebesar 0,576213, begitu juga sebaliknya.

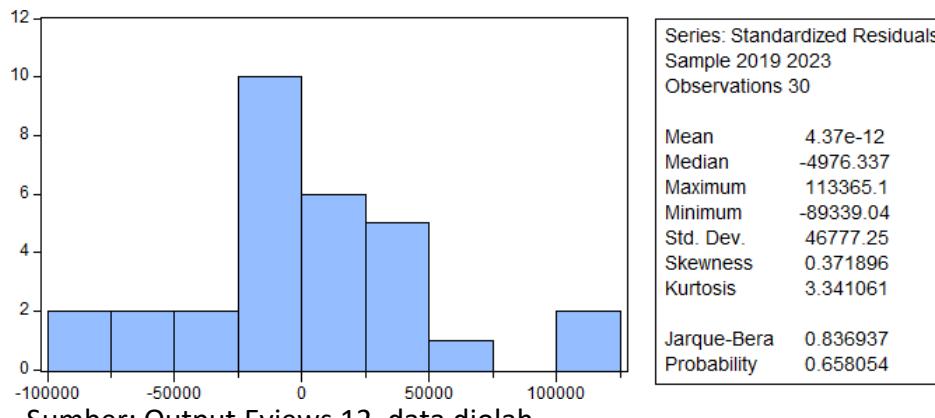
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui sebuah model regresi yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Sebelum melakukan analisis regresi perlu diadakan pengujian dalam asumsi klasik, meliputi:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dari variabel terikat maupun variabel bebas sama-sama berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu model yang berdistribusi normal. Pada uji normalitas dapat menggunakan Jargue-Bera test atau J-B. Berikut hasil uji normalitas:

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan gambar 1 uji normalitas tersebut, menunjukkan bahwa nilai probalitas sebesar 0,658054, sehingga lebih besar dari 0,05 ($0,658054 > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan memperlihatkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diterapkan untuk menguji terjadinya korelasi linier atau korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi. Terjadinya multikolinieritas ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Data yang baik ialah data yang tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_TPAK	X2_IPM	X3_IHK	LOG(X4_PKAP)
X1_TPAK	1.000000	-0.558170	-0.005227	-0.198507
X2_IPM	-0.558170	1.000000	-0.020409	0.615010
X3_IHK	-0.005227	-0.020409	1.000000	0.067076
LOG(X4_PKAP)	-0.198507	0.615010	0.067076	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas tersebut menunjukkan semua nilai correlation lebih kecil dari 0,9 (nilai corerelation < 0,90) sehingga H_0 ditolak dan menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat adanya ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kondisi model yang baik yaitu jika model bersifat homoskedastisitas. Jika suatu model mengalami heteroskedastisitas, maka hasil kesimpulan menjadi tidak valid. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
<i>F-statistic</i>	1.963162	<i>Prob. F(4,24)</i>	0.1325
<i>Obs*R-squared</i>	7.149384	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.1282
<i>Scaled explained SS</i>	8.603788	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.0718

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Prob. Chi-Square pada Obs R-squared lebih besar dari 0,05 ($0,1282 > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi yang kuat antarperiode waktu. Adanya masalah autokorelasi akan menghasilkan hasil estimasi koefisien yang bias dan varians yang dihasilkan bukan nilai yang sebenarnya. Model yang baik yaitu model yang tidak terkena masalah autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
<i>F-statistic</i>	0.675825	<i>Prob. F(2,22)</i>	0.5190
<i>Obs*R-squared</i>	1.678591	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.4320

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai Prob. Chi-Square pada Obs R-squared sebesar 0,4320 lebih besar dari 0,05 ($0,4320 > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan memperlihatkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat dari pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Berikut hasil uji F:

Tabel 7 Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	Prob. (F-statistic)	Keterangan
44.07567	0.0000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai F-Statistic sebesar 44.07567 dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.0000 kurang dari 0.05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa variabel TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu UMP. Maka, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

b. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial setiap variabel independen yaitu TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita terhadap variabel dependen yaitu upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut hasil dari uji T (parsial):

Tabel 8 Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	t-statistic	Prob.	Keterangan
C	0.887229	0.3834	-
TPAK	1.966087	0.0605	Tidak berpengaruh signifikan
IPM	3.584884	0.0014	Berpengaruh positif dan signifikan
IHK	-7.036330	0.0000	Berpengaruh negatif dan signifikan
Pengeluaran Perkapita	1.975786	0.5593	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 8, hasil uji T dapat dilihat pengaruh setiap variabel independen yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota, yaitu:

1) Variabel TPAK memiliki probabilitas sebesar 0.0605 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti H2 ditolak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi, dkk yang berjudul "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga

Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi". Hasil penelitian tersebut

menjelaskan bahwa secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi 2000-2015. Artinya, tinggi rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak akan mempengaruhi besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata perkembangan TPAK pada tahun 2000 hingga 2015 hanya sebesar 0,09 persen saja.

Sedangkan, rata-rata perkembangan UMP Jambi sebesar 16,77 persen. Ketimpangan rata-rata dari TPAK dan UMP menunjukkan bahwa perkembangan UMP meningkat, tapi tidak sejalan dengan perkembangan TPAK yang relatif stagnan karena nilainya di bawah satu persen. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alan Amundi Wibowo dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut disebabkan karena data TPAK di Provinsi DIY cenderung fluktuatif dari tahun 1990-2016. Pada tahun 1990 sampai 2009, kategori yang dijadikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Selanjutnya, mulai tahun 2010, kategori yang dijadikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Oleh karena itu, terjadi perbedaan data yang tersedia, sehingga data TPAK cenderung fluktuatif dan tidak selalu naik di setiap tahun. Sedangkan, data UMP setiap tahun selalu naik. Oleh karena itu, terjadi ketidaksesuaian perkembangan TPAK dan UMP (Wibowo, 2018). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Layli Lathifatul Putri dan Siti Aisyah dengan judul "Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa TPAK tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Hal ini disebabkan oleh upah yang disesuaikan dengan penawaran pasar tenaga kerja. Penurunan penawaran pasar tenaga kerja menyebabkan ketersediaan tenaga kerja yang tinggi dan upah tenaga kerja yang menjadi rendah (Putri dan Aisyah, 2024).

2) Variabel IPM memiliki memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0014 lebih kecil dari

0.05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap variabel UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti H3 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sujagad Susanto dengan judul "Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum di Indonesia". Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal tersebut berarti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan meningkatkan upah minimum provinsi. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang positif dengan upah minimum. Ketika Indeks Pembangunan Manusia tinggi, produktivitas juga akan cenderung meningkat dan pada akhirnya menyebabkan tingkat upah akan mengalami peningkatan (Susanto, 2021). Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Collyn Damanik dan Rika Surinato Zalukhu dengan judul "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pematangsiantar". Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal tersebut dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pematangsiantar terbilang cukup baik. Sehingga, ketika IPM mengalami kenaikan akan mempengaruhi meningkatnya Upah Minimum Kota Pematangsiantar (Damanik dan Zalukhu, 2022).

3) Variabel IHK memiliki memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari

0.05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel IHK berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti H4 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi, dkk yang berjudul

“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa secara parsial Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi 2000-2015. Artinya, ketika indeks harga konsumen naik, maka upah minimum provinsi akan menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan harga barang akan menurunkan nilai upah riil. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Triana Br. Sitorus dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Indeks Harga Konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2009- 2018. Hal ini berarti apabila indeks harga konsumen mengalami kenaikan, maka akan menurunkan upah minimum provinsi (Sitorus, 2018).

4) Variabel Pengeluaran Perkapita memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5593 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel PKAP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti H5 ditolak. terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindana Rahmawati Kusumaningrum dan Siti Fatimah Nurhayati dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata- rata pengeluaran perkapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP). Artinya, semakin besar pengeluaran perkapita, maka upah minimum juga akan meningkat (Kusumaningrum dan Nurhayati, 2023). Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Yunita dan Timbang Sirait dengan judul “Penerapan SAR pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Pulau Kalimantan Tahun 2017”. Hal penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan karena karakteristik pengeluaran per kapita di Pulau Kalimantan sejalan dengan klasifikasi berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu bagian barat Pulau kalimantan memiliki pengeluaran perkapita dan UMK yang rendah dan bagian timur memiliki pengeluaran perkapita dan UMK yang tinggi (Yunita dan Sirait, 2019).

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin mendekati angka satu artinya bahwa variabel bebas memiliki kemampuan yang besar dalam menjelaskan variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh eror dan sebaliknya. Apabila semakin mendekati angka 0 artinya semakin kecil kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya (Wahyudi, 2017). Berikut hasil Uji Determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi (R2)

<i>R-squared</i>	0.875809
<i>Adjusted R-squared</i>	0.855938

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.855938. Artinya, dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita) terhadap variabel dependen upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur secara simultan (bersama-sama) sebesar 85%. Sedangkan, sisanya sebesar 15% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Secara bersama-sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita terbukti berpengaruh signifikan terhadap upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel ini saling mempengaruhi besarnya upah minimum di daerah tersebut. Meskipun dalam uji hipotesis parsial, TPAK dan IHK tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap upah minimum, hasil penelitian tetap menunjukkan bahwa keempat variabel ini memberikan kontribusi besar terhadap besarnya upah minimum di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Ini berarti perubahan pada TPAK tidak akan mempengaruhi besarnya upah minimum di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pada periode 2019 hingga 2023, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi daerah, seperti inflasi, daripada oleh TPAK yang berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan.

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal tersebut berarti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan meningkatkan upah minimum provinsi. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang positif dengan upah minimum. Ketika Indeks Pembangunan Manusia tinggi, produktivitas juga akan cenderung meningkat dan pada akhirnya menyebabkan tingkat upah akan mengalami peningkatan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan IHK Jawa Timur yang cenderung fluktuatif di setiap tahun. Peningkatan IHK akan merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi turun. Kenaikan harga barang membuat minat masyarakat untuk konsumsi menurun yang berdampak pada penurunan omzet perusahaan. Sehingga, membuka peluang bagi perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang akan menambah jumlah pengangguran dan menurunkan kesejahteraan. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari UMP yaitu meningkatkan taraf hidup tenaga kerja.

Pengeluaran Perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Meskipun terjadi fluktuasi dalam pengeluaran perkapita, ini tidak mempengaruhi besar upah minimum yang ditetapkan. Pengeluaran perkapita mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, tetapi tidak mempengaruhi langsung kebutuhan hidup minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum. Faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, harga barang, produktivitas tenaga kerja, dan biaya hidup lokal juga mempengaruhi penetapan upah minimum.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi ekonomi saat menetapkan upah minimum, baik UMP maupun UMK. Sebelum menentukan

besaran upah minimum, diharapkan agar indikator-indikator yang memengaruhi upah minimum, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, dipertimbangkan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan pengeluaran perkapita mempengaruhi upah minimum, dengan pengeluaran perkapita sebagai faktor yang paling dominan. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup rentang waktu lima tahun dengan enam kabupaten/kota sebagai sampel, dan menggunakan analisis regresi data panel. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model analisis VAR atau VECM untuk memeriksa pengaruh jangka pendek dan panjang serta kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Alpina dan Neli Aida. 2024. Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistik*, 13 (1), 7-12. Padang: Universitas Putra YPTK Padang.
- Charysa, Ninda Noviani. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 277–285. Semarang: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Damanik, Daniel Collyn dan Rika Surinato Zalukhu. 2022. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pematangsiantar. *The Asia Pacific: Journal of Management*, 1 (1), 21-32. Rangkasbitung: STIE La Tansa Mashiro.
- Halim, Muhammad Abdul. 2012. *Teori Ekonomika* Edisi I. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Hartono, Tony. 2006. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kertiasih, Luh. 2017. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015. 2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9 (1), 148-157. Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Khairi, Mawardi, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Sleman: Deepublish.
- Kusumaningrum, Rindana Rahmawati dan Siti Fatimah Nurhayati. 2023. Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3 (5), 859-867. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mahrany, Yunita. 2012. "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan". Skripsi tidak Diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, dan Peter Wilson. 2008. *Pengantar Ekonomi Makro* Volume 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi* Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin dan Faris Wajdi. 2022. Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja. Malang: Ahlimedia Press.
- Putri, Layli Lathifatul dan Siti Aisyah. 2024. Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8 (1), 385-389. Jambi: LP2M Universitas Batanghari.
- Subri, Mulyadi. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Bambang Sujagad. 2021. Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum di Indonesia. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3 (1), 38-51. Pemantangsiantar: Universitas Simalungun.
- Sutama, I Nyoman, Asmini, dan Suci Astika. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7 (3), 281-291. Sumbawa Besar: LPPM Universitas Samawa.
- Todaro, Michael P. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyudi, Setyo Tri. 2017. *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapannya*. Malang: UB Press.